

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu faktor krusial dalam memajukan suatu negara. Negara yang berkembang biasanya adalah negara yang menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan dan tingkat pengetahuan warganya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana pendidikan yang berkualitas bagi warganya. Lingkungan dan fasilitas pendidikan menjadi penentu penting bagi kualitas dan keberlangsungan proses pendidikan itu sendiri.

Pengelolaan anggaran sekolah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan. Ketika dana publik atau bantuan dari pihak ketiga diterima, penting untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan. Pentingnya manajemen keuangan sekolah berkaitan erat dengan kebutuhan dana dalam menjalankan operasional sekolah. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan kelola keuangan yang efisien guna memastikan kelancaran aktivitas sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik mempunyai pembukuan yang lengkap, pembukuan tersebut harus terdiri dari catatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Hal-hal yang penting dilakukan dalam pencatatan seperti jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, catatan gaji, utang dan lain-lain (Zhuhayni, Adriana Madya Marampa, 2023).

Sarana dan Prasarana di sekolah merupakan indikator utama kualitas pendidikan, yang perlu terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting agar proses belajar mengajar dapat

berlangsung dengan baik. Namun, masih ada banyak fasilitas pendidikan yang belum memadai, seperti gedung sekolah, alat belajar mengajar, dan juga kurangnya kerjasama dengan berbagai lembaga mengajar, dan juga kurangnya kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat sering kali disebabkan oleh biaya pendidikan yang cukup tinggi, yang menghambat upaya memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Sumber biaya pendidikan berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Pendanaan dari APBN antara lain diperoleh melalui Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS), sedangkan dari APBD berwujud Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Dalam merancang penggunaan anggaran BPOPP, kepala sekolah dan jajaran manajemen harus terlebih dahulu menyesuaikan anggaran yang diterima, kemudian merumuskan rencana anggaran belanja dalam sebuah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pemerintah secara umum menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menawarkan bantuan kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar, serta memberikan pembebasan atau pengurangan biaya sekolah. Setiap sekolah akan menerima dana BOS yang dihitung berdasarkan jumlah siswa dan satuan dana yang ditetapkan. Dana tersebut disalurkan setiap semester untuk membantu pengelolaan sekolah. Penting untuk diperhatikan bahwa pengelolaan dana BOS harus mengikuti pedoman teknis yang telah ditetapkan.

Sekolah harus mampu mengelola dana BOS secara profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Dana BOS yang disediakan pemerintah dikelola secara mandiri oleh sekolah melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam hal pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan uang yang baik berjalan seiring dengan prinsip penghematan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas dalam pengelolaan dan pengendalian (Hidayah,2022).

Pengelolaan dana sekolah wajib dilandasi semangat akuntabilitas adalah tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam implementasi manajemen sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana anggaran satu tahun yang tercantum dalam laporan keuangan sekolah yang terdiri buku kas tunai, SPTJM, Rekapitulasi, pemeriksaan kas, penutupan kas, inventaris, Realisasi, Buku pembantu Bank, Buku pembantu pajak.

Dengan diterapkan sesuai pedoman yang disusun oleh pemerintah provinsi dalam bentuk Teknis BPOPP, Dengan mengutamakan prinsip mengolah dana secara profesional dan efisien, efektif, akuntabel dan mengawasi program BPOPP agar dapat menyediakan layanan Pendidikan yang lebih memadai untuk peserta didik. Namun terdapat kendala pada saat pelaksanaan realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggaran dana Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang telah dirancang. Masalah dana BPOPP terletak pada lambanya pencairan dana BPOPP dan pengelolaan di tingkat sekolah yang kurang akuntabel dan transparan, Terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana terjadi karena berbagai factor seperti

keterlambatan pencairan oleh pemerintah pusat dan surat pengantaran pencairan dana oleh tim manajemen BPOPP. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai proses pendaan dan pertanggung jawaban Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Peneliti ini mengambil penelitian di SMK RAJASA dengan pertimbangan bahwa SMK RAJASA Surabaya merupakan Lembaga Pendidikan atau sekolah yang menerima dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan uraian diatas peneliti Bermaksud melaksanakan penelitian yang berjudul “ **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS & BPOPP di SMK RAJASA SURABAYA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS dan BPOPP di SMK RAJASA Surabaya?

C. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan salah satu bentuk gambaran tentang arah yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian yang mengacu kepada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS dan BPOPP di SMK RAJASA Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan yaitu agar berguna untuk hal-hal berikutnya :

1. Manfaat teoritis

Dari Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi dalam menerapkan proses Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dilingkungan sekolah.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat dan disajikan sebagai bahan kajian bagi para pemangku kepentingan antara lain :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana di fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh di bangku kuliah.

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan dapat di jadikan refrensi untuk mahasiswa program studi Ekonomi dan Bisnis.

c. Bagi Pembaca

Dapat dipergunakan sebagai refrensi bagi mahasiswa yang membutuhkan penelitian lebih lanjut dibidang Akademik maupun Non Akademik.

